



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : Menjaga Kredibilitas Nota Keuangan
Tanggal : Jumat, 04 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

Masalah ekonomi hari ini adalah masalah kepercayaan.

Oleh **Dipo Satria Ramli**

Ekonom CORE Indonesia

Kandidat doktor Universitas Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 sebesar 5,29 yoy, melambat dibandingkan 5,61 persen pada kuartal I, tetapi tetap melampaui konsensus pasar yang berkisar 5,10 persen. Bahkan, sejumlah lembaga riset lokal memproyeksikan angka lebih rendah: CORE Indonesia sekitar 4,9 persen, sementara LPEM FEB UI di kisaran 4,80 persen.

Melampaui konsensus bukanlah masalah. Namun, ketika selisih antara proyeksi dan realisasi cukup lebar dan berulang pertanyaan mendasar muncul: komponen apa yang mendorong kenaikan tersebut? Tanpa penjelasan teknis yang memadai, ruang bagi narasi spekulatif turut melebar.

Selisih sekitar 20-50 basis poin terhadap konsensus, cukup signifikan untuk memengaruhi pemodelan pasar, ekspektasi, dan alokasi modal. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menekankan bahwa statistik resmi harus independen, berkualitas, dan mudah dipahami agar dapat menjadi dasar keputusan yang kredibel. Kepercayaan terhadap statistik resmi berkaitan dengan kepercayaan pada pemerintah; ketika masyarakat dan pelaku pasar sulit memahami atau memverifikasi angka resmi, kepercayaan dapat terganggu.

Dalam konteks Indonesia, yang perlu dibangun bukan skeptisisme terhadap angka BPS, melainkan kapasitas BPS dan pemerintah untuk menjelaskan mengapa realisasi bisa berbeda signifikan dari ekspektasi.

Narasi komponen dan sektoral

BPS menyebut pertumbuhan triwulan dua ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Pemerintah pun gencar menyoroti industri otomotif sebagai pahlawan pertumbuhan ekonomi. Anehnya, di balik narasi sukses tersebut, industri otomotif justru sedang 'batuk-batuk' di triwulan kedua. Potensi gelombang PHK di sektor ini memaksa pemerintah meluncurkan Satgas Mitigasi PHK untuk menghalangi relokasi pabrik. Kontradiksi ini memperlihatkan sinyal ganda yang membingungkan industri otomotif melaju kencang, tetapi nasib buruhnya justru terancam.

Di sisi lain, program MBG sendiri mengalami dinamika signifikan: pemotongan anggaran, pergantian kepemimpinan, dan penutupan ratusan dapur karena pelanggaran. Dalam konteks seperti ini, klaim bahwa MBG menopang pertumbuhan kuartal kedua menuntut atribusi yang presisi: seberapa besar kontribusi konsumsi pemerintah, sub-komponen yang terimbas, serta transmisinya ke sektor produksi dan distribusi.

Dampak MBG terhadap inflasi pangan juga patut diurai mengingat program ini memicu permintaan terstruktur pada komoditas tertentu. Penjelasan BPS dan Bank Indonesia krusial agar pasar dapat memvalidasi: apakah lonjakan konsumsi murni mencerminkan perbaikan daya beli riil, atau sekadar efek samping belanja terpusat pemerintah.

Pada saat yang sama, berita PHK di triwulan kedua menimbulkan pertanyaan tambahan: apakah pertumbuhan produksi benar-benar berkelanjutan, atau hanya bersifat sementara dan terfokus pada segmen tertentu? Tanpa penjelasan dan data rinci dari BPS, narasi ini akan tetap menjadi sumber kebingungan bagi pasar.

Nota keuangan

Pada 14 Agustus 2026, Pemerintah menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di hadapan DPR. Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6,0 persen, dengan defisit anggaran 2,40 persen terhadap PDB.

Nota Keuangan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan narasi fiskal dengan realisasi statistik. Jika BPS dapat menjelaskan secara rinci komponen mana yang mengejutkan di Q2-2026, termasuk peran konsumsi pemerintah dan program prioritas, maka asumsi makro fiskal 2027 dapat dibahas dengan dasar data yang lebih kokoh. Sebaliknya, jika gap proyeksi pasar–realisasi dibiarkan tanpa penjelasan, pasar berpotensi membaca angka resmi dengan skeptis.

Nota Keuangan pada dasarnya adalah dokumen kepercayaan: ia memuat asumsi pertumbuhan, target penerimaan, dan postur belanja yang akan menjadi rujukan bagi pelaku ekonomi. Ketika data historis, seperti pertumbuhan PDB, dianggap "jauh" dari ekspektasi tanpa penjelasan memadai, maka asumsi ke depan dalam Nota Keuangan juga cenderung didiskon oleh pasar.

Langkah konstruktif untuk BPS

Pertama, BPS perlu melangkah lebih jauh dari sekadar konferensi pers setelah rilis PDB. Penjelasan dalam forum tersebut seringkali bersifat umum dan tidak sepenuhnya menjawab pertanyaan kritis dari pasar dan akademisi, bahkan kadang terkesan defensif. BPS perlu merilis FAQ teknis yang membedah isu kritis, seperti anomali *base effect*, revisi data, hingga porsi efek harga versus volume di tengah perubahan *terms-of-trade*. Dokumen FAQ ini akan menjadi rujukan praktis bagi peneliti dan media, sekaligus membuktikan keterbukaan BPS dalam menjawab pertanyaan "sulit".

Kedua, granularitas sektoral lebih tinggi. Misalnya, publikasi kontribusi subindustri manufaktur, data produksi versus penjualan otomotif, serta perubahan inventori yang dapat menjelaskan perbedaan antara sinyal *output* dan kondisi ketenagakerjaan di sektor terkait.

Ketiga, rekam jejak proyeksi versus realisasi. Secara berkala, BPS dapat memublikasikan retrospektif sederhana: bagaimana angka awal, revisi, dan realisasi akhir bergerak dari waktu ke waktu. Ini bukan untuk "menyalahkan" *forecaster*, melainkan untuk membantu pasar menyelaraskan model mereka dengan metodologi BPS.

Pertumbuhan 5,29 persen di tengah perlambatan global adalah kabar baik. Namun, pasar membutuhkan kejelasan: mengapa realisasi melampaui ekspektasi, sektor apa yang mendorong, dan bagaimana hal ini konsisten ke depan. Ketika data resmi dipahami dan dipercaya, kebijakan menjadi lebih efektif, dan biaya ketidakpastian bagi ekonomi dapat ditekan.

Masalah ekonomi hari ini adalah masalah kepercayaan.

Dipo Satria Ramli, *CORE Indonesia dan Kandidat Doktor di Universitas Indonesia*